

**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2018**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
2017**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun 2016. Selanjutnya dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 setiap tahun di susun Rencana Kerja yang selanjutnya di sebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2016, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2018. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta istematika. |
| BAB II | Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Se kretariat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, <i>review</i> terhadap rancangan awal Sekretariat Daerah dan penelaahan usulan program masyarakat. |
| BAB III | Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah, Program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari Sekretariat Daerah. |
| BAB IV | Penutup, menguraikan kaidah–kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2017 |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Gambaran lengkap evaluasi capaian renstra dan renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 lampiran renja ini:

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017
SETDA KABUPATEN SOLOK SELATAN

Bagian Organisasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
								Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Th. 2017	Capaian Realisasi (%)
1				Urusan Wajib									
1	20			Pemerintahan Umum									
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama yang terlaksana	6 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	17%	1 Tahun	1 Tahun	33%
1	20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1	20	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	24 kali / 6 tahun		4 kali/tahun	4 Kali	17%	4 kali/tahun	4 Kali	33%
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur									
1	20	05	01	Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Formal	Sumber Daya manusia yang terlatih	20 PNS/ 6Tahun		5 PNS/Tahun	5 PNS/Tahun	25%			
1	20	05	18	Kegiatan Penegakan Disiplin PNS di Sekretariat Daerah	Rekap Abseb Apel Gabungan dan Rekap Absen Harian SETDA	33 SKPD		33 SKPD	33 SKPD	17%			
1	20	05	19	Analisis dan Pemetaan Jabatan	Data Analisis Jabatan dan	33 SKPD					33 SKPD	33 SKPD	100%

					Analisis Beban Kerja								
1	20	06		Program Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan									
1	20	06	01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang tersusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	17%	2 Dokumen	2 Dokumen	33%
1	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru									
1	20	27	04	Evaluasi dan Verifikasi SOTK	Jumlah SOTK yang di evaluasi	33 SKPD		33 SKPD	33 SKPD	17%	33 SKPD	33 SKPD	33%
1	20	27	06	Efektifitas Manajemen Lelebagaan dan SOTK	Jumlah SOTK yang di efektifkan	33 SKPD		33 SKPD	33 SKPD	17%			
1	20	44		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja									
1	20	44	02	Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	Dokumen SOP SKPD yang tersusun	27 SOP		27 SOP	27 SOP	17%	27 SOP	27 SOP	33%
1	20	45		Program Penyempurnaan Organisasi dan Tata Laksana Serta PAN									
1	20	45	01	Evaluasi Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	Dokumen SPM SKPD yang dievaluasi	17 Bidang		17 Bidang	17 Bidang	17%	6 Urusan	6 Urusan	33%
1	20	45	02	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	SKPD yang dinilai indeks kepuasan masyarakat	33 SKPD		8 SKPD	8 SKPD	24%			
1	20	45	08	Penyusunan RoadMap Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map yang tersusun	1 Dokumen							

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi
2. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum Lainnya
3. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
4. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan sebagian fungsi lini
5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan keprotokolan yang baru
6. Kurangnya Pembinaan terhadap admin e-monev
7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan bimtek
2. Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum melahirkan produk hukum daerah
3. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan
4. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda Kelembagaan dan Peraturan Bupati tentang Tupoksi
5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan keprotokolan
6. Peningkatan kompetensi admin e - monev

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah 9 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di bidang kepegawaian, perencanaan dan administrasi umum di internal Sekretariat Daerah.
2. Dinamisnya produk hukum dan perundang undangan memerlukan kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.

3. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media yang dapat di akses masyarakat.
4. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok Selatan harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok Selatan.
5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah.
6. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;
7. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional ;
9. Lahirnya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan memerlukan adaptasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017*

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Bagian Organisasi				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyusuna buku analisis jabatan Perangkat daerah		Penyusuna buku analisis jabatan Perangkat daerah	-	1 buku				1 buku			
2.	Evaluasi SOTK Kab.Solok Selatan		Evaluasi SOTK Kab.Solok Selatan	-	33 PD	33 PD	33 PD	33 PD	33 PD	33 PD	33 PD	
3.	Pembuatan TAPKIN dan LAKIP SKPD dan LAKIP PEMDA		Pembuatan TAPKIN dan LAKIP SKPD dan LAKIP PEMDA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
4.	Penyusunan dan Evaluasi SOP		Peraturan Bupati tentang SOP		33 Perbup	33 Perbup	33 Perbup	33 Perbup	33 Perbup	33 Perbup	33 Perbup	
5.	Penyusunan dan Monitoring pencapaian SPM		Dokumen Perencanaan SPM		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian di Lingkungan sekretariat daerah termasuk dalam salah satu pelaksana Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang mengfungsikan diri sebagai perumus kebijakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta fasilitasi penyusunan standarisasi ketatalaksanaan, khususnya pelayanan publik berkewajiban mendukung terwujudnya pelayanan prima pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Solok Selatan Sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Bagian Organisasi

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Organisasi	Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran administrasi kantor	100%	831.157.000	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran administrasi kantor	100%	831.157.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Bagian Organisasi	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan	12 Bulan	831.157.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah		Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan	12 Bulan	831.157.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bagian Organisasi	Meningkatnya Pemeliharaan dan Kelancaran Kendaraan Operasional	100%	30.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Pemeliharaan dan Kelancaran Kendaraan Operasional	100%	30.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian Organisasi	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	4 Kali	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Operasional	4 Kali	30.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bagian Organisasi	Tersusunya perencanaan yang tepat sasaran		130.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tersusunya perencanaan yang tepat sasaran		130.000.000	
	Penyusunan perencanaan dan penganggaran sekretariat daerah	Bagian Organisasi	Dokumen RKA dan Renja Setda Tahun 2019	2 Dokumen	40.000.000	Penyusunan perencanaan dan penganggaran sekretariat daerah		Dokumen RKA dan Renja Setda Tahun 2019	2 Dokumen	40.000.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Dokumen LKJ Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	2 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen LKJ Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	2 Dokumen	90.000.000	
6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Bagian Organisasi	Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi	100%	70.000.000	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi	100%	70.000.000	
	Evaluasi SOTK Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Perbup Tupoksi yang dievaluasi	100%	70.000.000	Evaluasi SOTK Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah Perbup Tupoksi yang dievaluasi	100%	70.000.000	
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Bagian Organisasi	Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	100%	50.000.000	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Solok Selatan	Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	100%	50.000.000	

	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian Organisasi	Jumlah SKPD yang sudah menyusun pencapaian SPM sesuai bidang kewenangannya	17 Bidang	50.000.000	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Solok Selatan	Jumlah SKPD yang sudah menyusun pencapaian SPM sesuai bidang kewenangannya	17 Bidang	50.000.000	
3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Bagian Organisasi	Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM	100%	50.000.000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM	100%	50.000.000	
	Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Bagian Organisasi	Jumlah SKPD yang telah disusun SOP nya	33 PD	50.000.000	Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Solok Selatan	Jumlah SKPD yang telah disusun SOP nya	33 PD	50.000.000	
	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Bagian Organisasi	Pelayanan Publik yang Prima		40.000.000	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Bagian Organisasi	Pelayanan Publik yang Prima		40.000.000	
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Bagian Organisasi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	40.000.000	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Bagian Organisasi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	100%	40.000.000	
	Total				1.165.905.000	Total				1.165.905.000	

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat seperti pada terlihat pada tabel terlampir.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Solok Selatan

Nama SKPD : **Bagian Organisasi Sekretariat Daerah**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan ;
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan penganggaran yang berbasis kinerja ;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Setda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi PD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Indikator Sasaran dan Formula Perhitungan

INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Solok Selatan Komponen Pelaporan kinerja	LHE Laporan Kinerja dari Kementerian PAN & RB
Rata-rata IKM Kabupaten Solok Selatan	Jumlah nilai IKM Perangkat Daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat dibagi jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan survey
Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	Jumlah perangkat daerah yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah kabupaten solok selatan
Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah di kabupaten solok selatan
Prosentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan diatasnya, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Perda, Perbup dan Kepbup)	Jumlah Peraturan Perundangundangan Daerah yang ditetapkan dibagi Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %
Prosentase tempat ibadah yang aktif	Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib (minimal 3 waktu) secara rutin. 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif.
Rasio Da'i/Mubaligh dengan jumlah penduduk	Jumlah Da'i/Mubaligh : Jumlah penduduk
Jumlah lomba-lomba keagamaan yang diselenggarakan	Jumlah Cabang Lomba keagamaan
Persentase Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta keagamaan.	Jumlah kebijakan dibanding jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta keagamaan
Prosentase meningkatnya Peran dan Fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kepada Bupati x 100%
Prosentase terbinanya BUMD	Jumlah Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable / Jumlah Usaha Daerah dan BUMD x 100%
Persentase Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, ESDM, Kehutanan dan Transmigrasi.	Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, ESDM, Kehutanan dan Transmigrasi.
Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan/ jumlah seluruh rumusan x 100 %
Persentase Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan perhubungan, Pu dan Penataan Ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta statistik dan persandian.-	Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan perhubungan, Pu dan Penataan Ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta statistik dan persandian..
Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Penilaian dari tim EKPPD kementerian Dalam Negeri
Rata-rata IKM Kecamatan	Jumlah nilai IKM kecamatan dibagi jumlah kecamatan
Jumlah Naskah Kerjasama (antar daerah, dengan Instansi Pemerintah, denga Badan Usaha/Hukum dan Perguruan tinggi)	Jumlah Naskah Kerjasama (antar daerah, dengan Instansi Pemerintah, denga Badan Usaha/Hukum dan Perguruan tinggi)
Persentase Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan serta Pemberdayaan masyarakat dan desa.	Jumlah kebijakan dibanding jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan serta Pemberdayaan masyarakat dan desa

Persentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP	Jumlah PBJ yang difasilitasi melalui ULP dibanding jumlah PBJ x 100%
Jumlah Perangkat Daerah yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJnya	Jumlah Perangkat Daerah yang dikendalikan rencana dan realisasi PBJnya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat, arsip dan sandi	Hasil survey kepuasan masyarakat, SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat, arsip dan sandi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan Tamu Daerah) terhadap layanan kerumah tanggaan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur
Rasio Jumlah berita positif di media massa	Jumlah berita positif tentang Kabupaten Solok Selatan yang dimuat di media massa : jumlah berita Pemerintah Daerah di media massa x 100 %
Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	Jumlah acara kedinasan yang sesuai dengan standard keprotokolan

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019
Bagian organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumbar Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Urusan Wajib								
	Pemerintahan Umum								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran administrasi kantor			1.050.000.000				1.100.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan	Bagian Organisasi	12 Bulan	1.050.000.000	APBD		12 Bulan	1.100.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Pemeliharaan dan Kelancaran Kendaraan Operasional			40.900.000				40.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional	Bagian Organisasi	4 Kali	40.900.000	APBD		4 Kali	40.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya perencanaan yang tepat sasaran			260.000.000				300.000.000
	Penyusunan perencanaan dan penganggaran sekretariat daerah	Dokumen RKA dan Renja Setda Tahun 2019	Bagian Organisasi	2 Dokumen	100.000.000	APBD		2 Dokumen	100.000.000
	Penyusunan Laporan Kinerja	Dokumen LK J Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018	Bagian Organisasi	2 Dokumen	160.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
	Program Penataan Daerah otonomi Baru				595.000.000				470.000.000
	Penyusunan Grand Desain RB	Dokumen Grand Desain RB	Bagian Organisasi	1 Dokumen	135.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
	Evaluasi SOTK Perangkat Daerah	Jumlah Perbup tupoksi yang dievaluasi	Bagian Organisasi	100%	130.000.000	APBD		100%	120.000.000
	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Dokumen ABK	Bagian Organisasi	1 Dokumen	100.000.000	APBD			
	Evaluasi Jabatan ASN	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dievaluasi jabtannya	Bagian Organisasi	33 PD	130.000.000	APBD		33 PD	150.000.000
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Bagian Organisasi	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000

				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan			120.000.000				150.000.000
				Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah SKPD yang sudah menyusun pencapaian SPM sesuai bidang kewenangannya	Bagian Organisasi	17 Bidang	120.000.000	APBD		17 Bidang	150.000.000
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM			360.000.000				470.000.000
				Penyusunan himpunan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik	Bagian Organisasi	5 kali	50.000.000	APBD		5 kali	50.000.000
				Koordinasi Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah SKPD yang dinilai IKM nya	Bagian Organisasi	33 PD	100.000.000	APBD		33 PD	150.000.000
				Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP seluruh Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	33 PD	80.000.000	APBD		33 PD	100.000.000
				Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi	Bagian Organisasi	5 Inovasi	60.000.000	APBD		7 Inovasi	100.000.000
				Forum Konsultasi Publik	Jumlah Forum Konsultasi	Bagian Organisasi	7 Kali	70.000.000	APBD		7 Kali	70.000.000
				Jumlah				2.425.900.000				2.530.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Renja SKPD dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Kerja Sekretariat Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Apabila terjadi kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan akan mengajukan penambahan anggaran kepada Bapak Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk dilakukan penambahan anggaran melalui Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK). Namun demikian, untuk menghindari kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, diusahakan dalam menyusun anggaran benar-benar didasarkan atas penyusunan perencanaan secara sistematis.

Selanjutnya beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus diantaranya :

1. Meningkatkan kemampuan personel atau sumber daya manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan, baik melalui kursus maupun diklat.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal.

Demikian untuk dilaksanakan.

Padang Aro, Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ir. YULIAN EFI, MM
Nip. 19661118 199303 1 005